

ABSTRAK

KENDALA DALAM PENERAPAN ELEKTRONIC SURAT PEMBERITAHUAN (E-SPT) DAN ELEKTRONIC FILLING SYSTEM (E-FILLING) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Oleh : Mentari Risdayanti Lubis

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru kecamatan Senapelan yang berlangsung sejak 2 juli sampai 1september 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menggunakan e-SPT dan e-Filling di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, serta upaya yang dilakukan KPP kepada wajib pajak dalam menggunakan e-SPT dan e-Filling di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: wajib pajak yang melaporkan SPT dalam bentuk eSPT dan eFilling belum cukup banyak dibandingkan dengan bentuk manual, dan masih banyak wajib pajak yang belum paham dalam penggunaan system aplikasi e-SPT dan e-Filling.

Ada beberapa faktor hambatan yang berkenaan dengan pendaftaran dan pelaporan e-SPT dan e-Filling di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu : Wajib pajak tidak paham dalam pengoprasian e-SPT dan e-Filling dan banyak Wajib Pajak yang masih enggan dalam menggunakan system aplikasi e-SPT dan e-Filling.

Kata kunci : Kendala System Aplikasi E-SPT (Electronic Surat Pemberitahuan) dan E-FILLING(Electronic Filling System)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa tercurah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul : **KENDALA DALAM PENERAPAN E-SPT DAN E-FILLING DI KANTOR PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**, sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Ahli Madya (Amd) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan mulai dari masa persiapan hingga penyelesaian, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta purek, I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin dalam penyusunan Tugas Akhir ini
3. Bapak Mahmuzar, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas dukungannya dalam pembuatan Tugas Akhir ini sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan berupa motivasi dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Si, Ak selaku dosen pengajar di jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau
7. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah banyak membantu penulisan dalam Penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Buat Fuji Meizar, seseorang yang selalu dihatiku yang telah memberikan motivasi dan bantuan serta semangat yang kuat dalam pencapaian segala hal dalam hidupku.

9. Untuk semua teman dan sahabatku seangkatan ku di Administrasi Perpajakan Tahun 2010 yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam suka maupun duka yang kita lalui sema 3 tahun mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul kembali, semoga kita bisa menjadi orang sukses.

10. Buat semua keluarga ku, yang selalu mendukung dan motivasi dalam pembuatan Tugas Akhir ini

Semoga kebaikan semua pihak tersebut diatas mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa'Ta'ala, Amin. Akhir kata penulis sangat berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis,

Mentari Risdianti Lubis
NIM: 01076203694

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	8
1. Lokasi Penelitian.....	8
2. Waktu Penelitian	9
3. Jenis Data	9
4. Teknik pengumpulan Data	9
5. Analisis Data	10

E. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	12
A. Sejarah Umum KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	12
B. Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	13
1. Visi	13
2. Misi	13
C. Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	15
D. Bagian/Unit Kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.....	18
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	21
A. Tinjauan Teori	21
1. Pengertian Pajak.....	21
2. Fungsi Pajak.....	23
3. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	23
4. Pengelompokan Pajak	25
5. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	27
6. Pengertian E-FIN, ASP, E-SPT dan E-FILLING	28
7. Dasar Hukum	31
8. Kelebihan E-SPT dan E-FILLING.....	31
9. Tata Cara PendaftaranSPT Manual	35
10. Pajak Padangan Islam	37
11. Pandangan Islam terhadap Sains dan Teknologi.....	38

B. Tinjauan Praktek	41
1. Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan E-SPT dan E-FILLING	41
2. Sanksi Tidak/Keterlambatan Penyampaian SPT.....	50
3. Kendala dalam Penerapan E-SPT dan E-FILLING	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	54
1. Kesimpulan	54
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) secara Manual.....	4
Tabel I.2	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Melaporkan Surat Pemberitahuan (E-SPT)	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	14
Gambar III.1	Tata Cara Pendaftaran ke ASP.....	43
Gambar III.2	Tata Cara E-SPT dan E-FILLING	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam Negeri. Perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, alokasi pajak tidak hanya untuk pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan membayar pajak. Maka diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai pencerminan warga Negara yang baik dan taat kepada hukum.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan melakukan pengembangan system pelaporan SPT dengan *Elektronic Filling System (e-Filling)* merupakan kelanjutan dari penyampaian SPT dalam bentuk elektronik atau dikenal dengan *Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)*.

Dasar hukum dari pelaporan SPT melalui eFilling dimulai dengan KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*eFilling*) melalui perusahaan penyedia jasa *Application Service Provider (ASP)*

Tujuan utama pelayanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukan dari rumah atau tempat kerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukan dari lokasi kantor atau usahanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, sosial dan politik pajak sering mengalami perubahan, demi untuk mencapai target dan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk itu Direktorat Jendral Pajak telah memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mendaftar dan melaporkan pajak, dengan menggunakan system on-line dalam aplikasi *E-SPT* dan *E-FILLING*.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara manual (kertas) dan dalam bentuk elektronik. Dengan ada nya SPT bentuk digital sangat bermanfaat sekali bagi petugas pajak, karena petugas pajak tidak perlu lagi merekam SPT yang dilaporkannya. Tetapi dalam perjalananya Wajib pajak Orang Pribadi masih sedikit sekali yang menggunakan SPT dalam bentuk elektronik.

Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) adalah Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.

Elektronic Filling System (E-FILLING) adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet.

Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ini telah menerapkan system on-line dalam mendaftar dan melaporkan *Surat Pemberitahuan Elektronic (E-SPT)* dan *Elektronic Filling System (E-FILLING)*, dimana KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ini baru memperkenalkan kepada wajib pajak adanya system *eSPT* pada tahun 2007 dan *eFilling* pada tahun 2008, dengan system on-line ini KPP lebih mudah untuk mengefisienkan operasional dan administrasi di KPP. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ini baru mewajibkan bagi wajib pajak untuk menggunakan *eSPT* pada tahun 2010 dan *eFilling* tahun 2011. KPP Pratama Senapelan mewajibkan kepada wajib pajak yang harus menggunakan system on-line ini yaitu bagi wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberituannya (SPT) sebanyak 25 SPT baik wajib pajak orang pribadi mau pun badan. Saat ini wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan masih menggunakan manual karena wajib pajak merasa lebih mudah dari pada menggunakan system on-line. Wajib Pajak yang telah melaporkan secara manual, akan direkam oleh bagian Pengolahan Data dan Informasi dan secara langsung rekaman tersebut sampai di Kantor Pusat Pelayanan Pajak.

Berikut ini adalah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual :

Tabel I.1
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Melaporkan
Surat Pemberitahuan (SPT) secara Manual
Tahun 2004-2010

NO	TAHUN	WP OP YANG MELAPOR	WP BADAN YANG MELAPOR	KETERANGAN
1	2004	4.139	2.400	Manual
2	2005	4.737	2.517	Manual
3	2006	5.024	2.655	Manual
4	2007	7.583	2.755	Manual
5	2008	16.100	2.469	Manual
6	2009	23.691	2.239	Manual
7	2010	30.053	2.559	Manual

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tahun 2004 KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual ditetapkan sebesar 4.139 wajib pajak. Dan jelas terlihat tabel di atas dari tahun ke tahun wajib pajak orang pribadi meningkat dalam melaporkan SPT ke KPP Pratama Pekanbaru Senapelan hingga tahun 2010 mencapai 30.053 wajib pajak yang melaporkan secara manual.

Sedangkan wajib pajak badan yang melaporkan SPT secara manual terlihat juga ditabel bahwa wajib pajak badan pada tahun 2004-2010 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana terlihat pada tahun 2004 wajib pajak melaporkan SPT sebesar 2.400 wajib pajak sedangkan pada tahun 2005

mengalami peningkatan sebesar 2.517 wajib pajak dan begitu juga pada tahun 2007 yang mengalami peningkatan sebesar 2.755 wajib pajak, sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan, dimana wajib pajak badan yang melapor hanya sebesar 2.469 wajib pajak badan, dan tahun 2009 yang semakin menurun hingga mencapai 2.239 wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Tahun 2010 mulai meningkat hingga 2.559 wajib pajak badan yang melaporkan SPT secara manual.

Terlihat jelas data diatas bahwa wajib pajak Orang Pribadi (OP) mau pun Badan lebih suka melaporkan SPT nya secara manual dari pada secara elektronik, berikut ini akan terlihat perbandingan data wajib pajak Masa PPN yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual dan elektronik bulan Desember Tahun 2011 yaitu pada tahun 2011 wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual sebanyak 1832 wajib pajak dan secara elektronik e-SPT hanya 279 wajib pajak yang melapor. Terlihat jelas perbandingan wajib Pajak Masa PPN yang melaporkan Surat Pemmberitahuan (SPT) secara manual lebih banyak dari pada dengan menggunakan elektronik. Sedangkan wajib pajak yang melaporkan secara elektronik dapat dilihat :

Tabel I.2
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Melaporkan
Surat Pemberitahaun Electronic (eSPT)
Tahun 2007-2012

NO	Tahun	WP yang Melapor	Keterangan
1	2007	90	eSPT
2	2008	90	eSPT
3	2009	78	eSPT
4	2010	82	eSPT
5	2011	241	eSPT
6	2012	301	eSPT

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Dari data diatas terlihat jelas wajib pajak yang menggunakan system elektronik pada tahun 2007 sampai 2008 sebesar 90 Wajib Pajak, sedangkan tahun 2009 wajib pajak mulai adanya penurunan dalam menggunakan eSPT yaitu sebesar 78 wajib pajak. Tahun 2010 wajib pajak meningkat dalam melaporkan eSPT sebesar 82 wajib pajak, dan semakin lama wajib pajak semakin meningkat dalam menggunakan elektronik dari tahun 2010 sebesar 241 wajib pajak, hingga tahun 2012 mencapai 301 wajib pajak yang melaporkan eSPT.

Dengan adanya perbandingan antara wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual dengan elektronik, maka terlihat jelas bahwa wajib pajak lebih banyak menggunakan manual dari pada system elektronik. Karena wajib pajak merasa, dengan menggunakan system on-line banyak mengalami kendala, dimana disebabkan oleh adanya ketidak fahaman dalam pengisian *eSPT* dan *eFilling* tersebut dan adanya pengaduan wajib pajak ke KPP yang belum mengerti dengan system on-line dan kendala lainnya lagi.

Sedangkan Wajib Pajak yang menggunakan *eFilling* baru tahun 2011 dimana hanya wajib Pajak Tahunan, dan hanya beberapa wajib pajak.

Permasalahan yang dijumpai di lapangan yang berkaitan dengan e-SPT dan e-Filling, ternyata masih banyak wajib pajak yang enggan menggunakan eSPT dan e-Filling karena wajib pajak terbiasa menggunakan manual dan juga pengetahuan atau pemahaman petugas pajak yang tidak merata.

Dalam pendaftaran dan pelaporan eSPT dan eFilling, wajib pajak mengalami banyak kendala dan kejadian yang terjadi di lapangan di saat petugas pajak mendatangi ke tempat wajib pajak badan dalam himbauan pendaftaran dan pelaporan eSPT dan eFilling. Kejadian yang luar biasa yang dialami bagi petugas pajak, dimana wajib pajak yang berkeras menolak atas pelaporan dan penyampaian pajak dengan menggunakan system elektronik hingga terjadinya perkelahian yang melibatkan pihak ke polisian, karena kantor pelayanan pajak telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan banyak kendala lainnya bagi wajib pajak dan kantor pelayanan pajak.

Dari pernyataan diatas, mengenai pendaftaran dan pelaporan elektronik dan kendala yang dihadapi wajib pajak dan KPP, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dalam memenuhi tugas akhir dengan judul “ **Kendala dalam Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) dan Elektronik Filling System (E-FILLING) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan**”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dan melihat permasalahan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Pekanbaru Senapelan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja kendala dalam Pendaftaran dan Pelaporan eSPT dan eFilling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan kepada wajib pajak dalam Pendaftaran dan Pelaporan eSPT dan eFilling?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk kendala dalam pendaftaran dan pelaporan e-SPT dan e-Filling.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP kepada wajib pajak dalam pendaftaran dan pelaporan eSPT dan eFilling.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian dengan permasalahan lain yang terkait.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan tanggal 02 July 2012 dan akan direncanakan selesai bulan Mei 2013.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada kepala seksi pengolahan data dan informasi dan pegawai-pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan dokumen.

Interview yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan kepada pegawai Seksi Pengolahan Data yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diberikan bagi penyusun penulisan ini.

Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu eSPT dan eFilling di bagian Pengolahan Data dan Informasi.

5. Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, tentang sejarah singkat, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok dan fungsinya.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang Kendala dalam Pendaftaran dan Pelaporan eSPT dan e-Filling.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah di kemukakan dari bebrapa saran yang menjadi bahan masukan dalam Pendaftaran dan Pelaporan e-SPT dan e- Filling.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi dibidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan system *self assessment* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pembentukan kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar diubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh Rumbai
5. Kecamatan Rumbai Pesisir
6. Kecamatan Tangkerang Timur

B. VISI DAN MISI KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

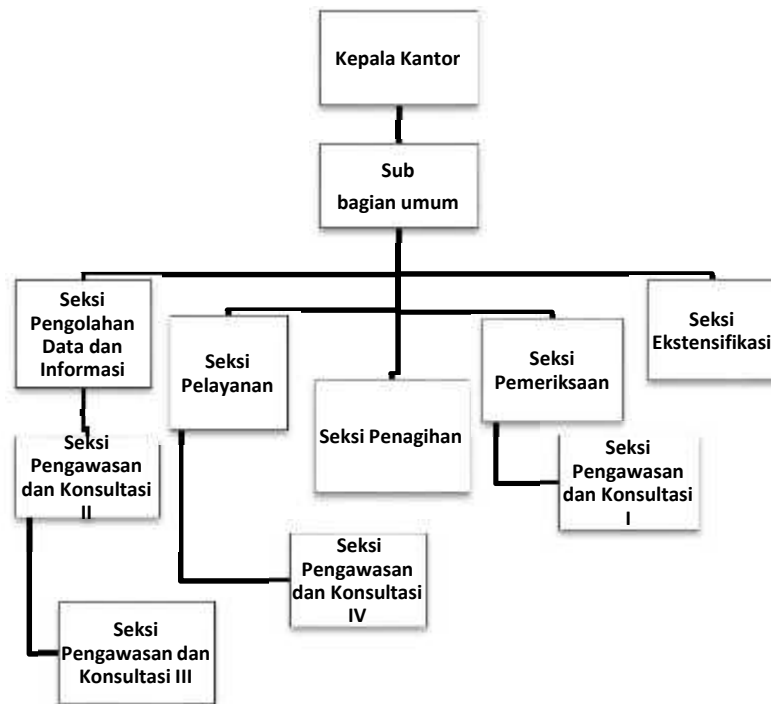
1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat.

2. Misi

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi

Struktur Organisasi
KPP Pratama Pekanbaru Senapelan



**Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan*

C. URAIAN TUGAS KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan.
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

3. Seksi Pelayanan

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat- surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Penyajian informasi perpajakan
- d. Perekaman dokumen perpajakan
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan Pengalokasian penatausahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- f. Pelayanan dukungan teknis computer
- g. Pemantauan aplikasi *e_SPT* dan *e_filing*
- h. Penyiapan laporan kerja

5. Seksi Ekstensifikasi

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek pajak
- c. Penilaian objek pajak
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Seksi Pemeriksaan

- a. Pelaksana penatausahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya
- b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

D. BAGIAN / UNIT KERJA KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru

Senapelan terdiri dari :

- 1.** Kepala Kantor : Ponti K. Mawardi
- 2.** Sub Bagian Umum : Gatut Nugroho
Terbagi 4 Sub Seksi
 1. Bendaharawan : Chotama
 2. Penata Muda TK I : Ernawati Siregar
 3. Penata Muda : Purnama Sari Saragih
 4. Pengatur : Kordinan Manik
- 3.** Seksi Pelayanan
Kepala Seksi : Mariyaldi, SE
Pelaksana Pelayanan : Erlida
: Mulyana Jaya
: Ferdian
: Novia Rahmawati
: Marlis
: Freddi Agustinus S
: Gama Pamungkas

4. Seksi Pengolahan Data dan informasi

Kepala Seksi	: Emri Mora S
Pelaksana PDI	: Joko Sulistio
	: Subakto S
	: Dwi Darmawan
	: Magdalena Sinaga
	: Bangun Effendi N
	: Wahyu Hanafi Azis
	: Doni Pratama

5. Seksi Ekstensifikasi

Kepala Seksi	: Muhammad Rosyadi
Pelaksana Ekstensifikasi	: Rosmawati
	: M. Nazar
	: Ermansyah B
	: Yanto Heryanto
	: Suhari
	: Eef Herviyanto

6. Seksi Penagihan

Kepala Seksi	: Haidar Tanjung
Pelaksana Penagihan	: Jutiza Sunisu
	: Johannes Ritonga
	: Arzen Asbari

7. Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi

: Armein Alamsyah

Pelaksana Pemeriksa

: Wawan Edi Setiawan

: Supranata Sipanulang

: Suryanta, Ak

: Joko Pramono

: Dhodi Okyanto

: Budi Sukmana

: Budhi Wahyu Widiyanto

: Ronny Petra Amzar

: Tengku Susi Indrianty

: Hervianda Robbiansyah

: Andri

: Eko Rohardiyanto

: Larno

: Iskhak Zainal Arifin

: Adithya Husada

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemahamidjaja dalam Y.Sri Pudyatmoko (2009:2). Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Adrianai dalam Y. Sri Pudyatmoko (2009:3).Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Smeets, dalam De Economische Betekenis der Belastingen, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,

dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual., maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Djajadiningrat dalam Resmi (2010:1) menyatakan bahwa: Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi yang di kemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kontribusi wajib/kewajiban kepada Negara.
2. Bersifat memaksa, dan dikenakan sanksi apabila tidak dipenuhi.
3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
4. Tidak ada imbalan secara langsung (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk .

5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2. Teori -Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dalam mencapai kesejahteraan, beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu harus membayar pajak yang diberikan suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Dalam penulisan ini saya menggunakan teori kepentingan, karena sesuai dengan masalah yang diambil yaitu kemudahan dalam membayar pajak. Dimana wajib pajak diberikan kemudahan oleh Dirjen Pajak dalam mendaftar dan pelaporan eSPT dan eFiling demi untuk kepentingan dan kemudahan wajib pajak.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu :

- Unsur Subjektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur Objektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang dipenuhi.

b. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran adalah kewajiban.

c. Teori Azas dan Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

3. Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti mempertahankan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari :

- Pajak Provinsi

Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan diatas Air

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

4. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan penggunaannya :

a) Wajib Pajak

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- c. Harta dan Kewajiban
- d. Pemotongan/Pemungutan Pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa pajak.

b) Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau Pelunasan Pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

5. Pengertian Electronic Filing Identification Number (E-FIN), Application Service Provider (ASP), Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) dan Electronic Filing System (E-FILLING)

Semua wajib pajak berdasarkan *self assessment* wajib mendaftarkan diri dengan secara electronic yang disebut *electronic filing identification number* (eFIN) sebelum adanya system elektronik wajib pajak wajib mendaftarkan diri secara manual yang disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini berfungsi untuk menjaga

ketertiban administrasi perpajakan antara lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Sedangkan secara elektronik dimana wajib pajak bisa mendaftarkan diri secara elektronik yang disebut dengan *electronic filling identification number (eFIN)*. *Electronic filing identification number (eFIN)* adalah nomor identitas, yang diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Wajib pajak harus mendaftar ke salah satu *Application Service Provider (ASP)* yang ditunjukkan oleh Dirjen Pajak. *Application Service Provider (ASP)* adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak menyampaikan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Electronic (*eSPT*) adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan berbentuk Formulir Elektronik dalam media computer. Aplikasi Surat Pemberitahuan (SPT) ini diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Dan *Electronic Filling System (eFilling)* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui system on-line yang real time. Dalam system elektronik ini wajib pajak yang paling diharuskan adalah wajib pajak yang telah melaporkan SPT nya sebanyak 25 Surat Pemberitahuan (SPT).

Pengertian *Surat Pemberitahuan Electronic (eSPT)* menurut Pasal 1 ayat 4 UUD KUP adalah data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT)* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dan *Electronic Filling System (eFilling)* menurut Pasal 1 ayat 5 UUD KUP adalah cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Tujuan dalam layanan pajak *Electronic Filling System (eFilling)* ini adalah untuk membantu menyediakan fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya.

Wajib pajak juga bisa menggunakan eSPT dalam pelaporan Surat Pemberituannya tanpa harus menggunakan eFilling. Dengan cara wajib pajak langsung menyampaikan eSPT di KPP, setelah melakukan pelaporan eSPT. Tanpa harus menggunakan eFilling wajib pajak juga bisa.

Dengan adanya system on-line ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pajak secara benar dan tepat.

Dan juga memberikan dukungan Kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan Electronic Filling System (*eFilling*) ini sistem pelaporan menjadi lebih mudah dan cepat, diharapkan jumlah wajib pajak dapat meningkatkan lagi penerimaan Negara tercapai.

6. Dasar Hukum Surat Pemberitahuan Electronic (E-SPT) dan Electronic Filling System (E-FILLING)

Dasar hukum *eSPT* dan *eFiling* adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Umum dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Nomor : PER-6/PJ/ 2009
 - b. Nomor :PER-66/PJ/2009
 - c. Nomor : KEP 05/ PJ/2005
 - d. Nomor : KEP-88/PJ/2004
 - e. Nomor : PER-152/PMK.03/2009
 - f. Nomor : KEP-383/PJ/2002

7. Kelebihan Aplikasi Surat Pemberitahuan Electronic (E-SPT) dan Electronic Filling System (E-FILLING)

Surat Pemberitahuan Electronic (*E-SPT*) atau penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

Kelebihan dari aplikasi Surat Pemberitahuan Electronic (*e-SPT*) ini adalah

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
2. Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi Surat Pemberitahuan Electronic (*e-SPT*) mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Jenis-jenis SPT yang telah disediakan program aplikasi Surat

Pemberitahuan Electronic (*e-SPT*) yaitu :

1. eSPT PPN dan PPNBM
 - a. Formulir 1107 Non PUT
 - b. Formulir 1107 PUT
2. eSPT PPH Massa
 - a. Pasal 21/26
 - b. Pasal 22

- c. Pasal 23/26
 - d. Pasal 4 ayat 2
 - e. Pasal 15
3. eSPT PPh Tahun Orang Pribadi
- a. Orang pribadi (formulir 1770)
 - b. Orang pribadi (formulir 1770 S)
 - c. Orang pribadi (formulir 1770 SS)
4. eSPT PPh Tahun Badan
- a. Badan Rupiah (Formulir 1771)
 - b. Badan Dollar (Formulir 1771 \$)
 - c. Pasal 21 (Formulir 1702)

Electronic Filling System (*E-Filing*) melalui www.pajak.go.id adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan kapan saja).

Kelebihan fasilitas Electronic Filling System (*e-Filing*) melalui www.pajak.go.id

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24/7).
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) karena pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian Surat pemberitahuan (SPT).
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Dan manfaat yang diperoleh KPP dengan adanya system e-SPT dan e-Filling yaitu :

1. Mengurangi resiko kesalahan input perekaman.
2. Tidak perlu melakukan perekaman SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.
3. Mengurangi penyimpanan dokumen dibandingkan jika menggunakan hardcopy
4. Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data direktorat Jenderal Pajak.
5. Mengurangi pertemuan langsung antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak.

6. Mengurangi dampak antrian dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT.
7. Mengurangi volume berkas fisik atau kertas dokumen perpajakan.
8. Mengurangi kesalahan dalam perekaman data SPT.

9. Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Manual

Salah satu perwujudan pelaksanaan sistem *Self assesment* di bidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak terutang kepada pemerintah yang secara langsung yang disampaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dimana dalam pengambilan Surat Pemberitahuan wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh wajib pajak.

Tempat pengambilan Surat Pemberitahuan dapat diambil di tempat sebagai berikut :

- a. Kantor Pelayanan Pajak
- b. Kantor Penyuluhan pajak
- c. Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan
- d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau
- e. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Dan dalam pengisian Surat Pemberitahuan wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal lampiran Surat Pemberitahuan, disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*), Pengusaha Kena pajak (PKP) dapat menyesuaikan bentuk lampiran SPT sesuai dengan kebutuhan banyaknya transaksi yang dikeluarkan. Penyesuaian bentuk Lampiran SPT tetap mencantumkan identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyampaian SPT dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan cara manual yaitu:

- a. Disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat atau
- b. Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat.

Penyampaian SPT dengan manual adalah penyampaian SPT yang induk SPT nya disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*).

10. Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak dalam pandangan Islam sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat At-taubah ayat 29 sebagai berikut :

وَيُفَوِّضُ الْإِسْلَامَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يَفْضَلْ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا فَمَا يُفَعِّلْ اللَّهُ شَيْئًا يَافَعِلْ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِآيَاتِنَا عَلَيْكَ إِذْ يُبْعَثُ الرِّسَالُ لَأُتَوَكَّفَ عَلَىكَ الْمُجْرِمُونَ يَأْمُرُوكَ بِالْمَدِينَةِ تَقِيَهَا تَحْتِ الْيَمِينِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْإِسْلَامِ إِلَهُ الْإِسْلَامِ فَذَرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ الْبُرْهَانُ مِنْ رَبِّكَ فَتَعْلَمَ ۚ

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah).dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(QS. At-taubah.29)

Pajak dalam Islam disebut dengan Jizyah yaitu pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan muslim, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah adalah pungutan yang dapat dipaksakan dimana dalam ayat diatas mengatakan bahwa boleh memerangi bagi mereka yang tidak mau membayar Jizyah sebagaimana pajak yang dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pajak dipungut secara Islam bagi yang enggan membayar pajak maka dapat ditagih secara paksa, sita, dan bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap anjuran yang telah ditetapkan.

11. Pandangan Islam Terhadap Sains dan Teknologi

Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Seperti kita ketahui para ilmuwan islam seperti al-Khawarizmi ahli matematika, Ibnu Firnas konseptor pesawat terbang, Jabir bin Haiyan bapak kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya mengerahkan segenap upaya dan berkarya untuk umat. Jadi, Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi, tetapi justru Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak 13 abad yang lalu.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : “Kalian lebih tahu urusan dunia kalian” (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan kebolehan mengenai sains dan teknologi karena pada saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang pertanian, tapi Rasulullah tidak memberikan jawaban yang benar karena Rasulullah tidak ahli dalam pertanian.

Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum peradaban yang gemilang.

Dalam konteks ini, tidak ada pertentangan antara sains dan Islam, dimana keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai *khalifatullah* di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Ayat yang mendukung pengembangan sains adalah firman Allah Swt. yang berbunyi bahwa:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ () ذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحًا
()

Artinya: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau*

menciptakan Ini dengan sia-si. Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. QS. Ali-Imran: 190-191).

Ayat-ayat di atas adalah sebuah *support* yang Allah berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Sebuah anjuran yang tidak boleh kita abaikan untuk bersama-sama melakukan penggalian keilmuan yang lebih progresif sehingga mencapai puncak keilmuan yang dikehendaki Tuhan

Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan *madaniyah 'am* yaitu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan *hadlarah*. Sebagaimana Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *Nizhamul Islam* menyebutkan bahwa “*Sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi/industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia*”.

Madaniyah itu sendiri merupakan merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindera dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan.

Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh/mubah. Islam bertujuan untuk menggapai ridha Allah SWT dan standarnya adalah halal-haram. Artinya penggunaan sains dan teknologi dalam Islam adalah untuk menggapai ridha Allah SWT.

Kesimpulannya adalah Islam memandang bahwa benda-benda hasil sains dan teknologi adalah mubah. Siapapun boleh mengambilnya dan menggunakannya. Dalam penggunaannya tentu berbeda antara orang yang

berpikiran Islam dengan orang yang berpikiran kapitalis atau sosialis. Maka tinggal kita pilih kacamata mana yang benar untuk memandang dan menghukumi berbagai macam fakta.

Maka sesuai dengan perspektif Islam penggunaan teknologi dalam pendaftaran dan pelaporan eSPT dan eFilling sangat penting bagi wajib pajak untuk mengembangkan pengetahuan dan mempermudah bagi wajib pajak dan petugas pajak. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia dalam pembayaran pajak.

B. Tinjauan Praktek

1. Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Electronic (eSPT) dan Electronic Filling System (eFilling)

Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan media komputer Surat Pemberitahuan electronic (eSPT) adalah SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar. Aplikasi eSPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

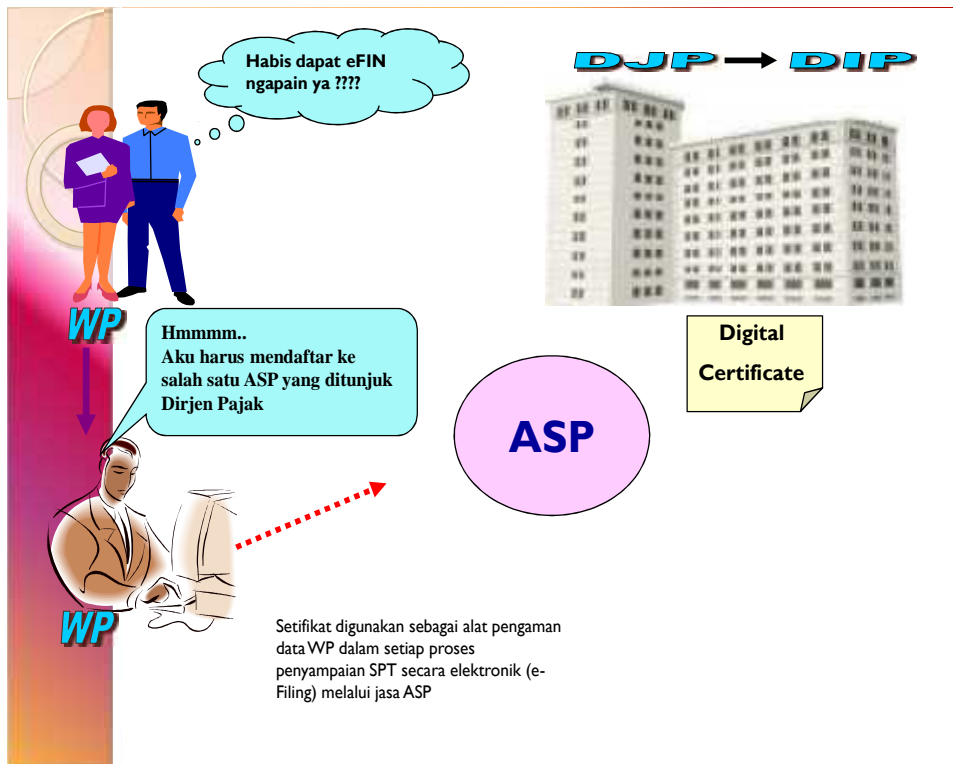
Tata Cara Pendaftaran dan Digital Certificate adalah Wajib pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filling Identification Number (e-Fin) dapat mendaftarkan diri melalui websites satu atau beberapa Perusahaan penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Setelah wajib pajak mendaftarkan diri, Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) mengirimkan kepada Wajib Pajak tata cara penyampaian elektronik (e-Filling). Aplikasi e-SPT disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya. Wajib Pajak meminta Sertifikat (digital Certificate) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui website Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Sertificate (digital certificate) diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Electronic Filling Identification Number (e-FIN) yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Sertifikat (digital certificate) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (e-Filling) melalui sesuatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.

GAMBAR III.1
Tata Cara Mendaftar ke ASP



Tata Cara Pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan , yaitu diantaranya :
 - a. Data identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas WP yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan.
 - b. Bukti Pemotong/Pemungutan PPh

- c. Faktur Pajak
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SPP) seperti, Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPP, kode MAP/KJS, jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
 4. Wajib pajak mencetak bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dalam menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
 5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi *e-SPT*.
 6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
 7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disampaikan dalam media komputer (disket, CD,dsb).
 8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa formulir Induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa formulir Induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dengan membawa Berita Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Pelaporan *eSPT* dengan *eFiling*. Sebelum wajib pajak melaporkan SPT dengan *eFiling*, wajib pajak harus melalui berapa prosedur yang dilakukan adalah:

1. Wajib pajak mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk mendapatkan *electronic filing identification number* (e-FIN), satu nomor *eFIN* hanya dapat digunakan untuk satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan registrasi melalui situs *eFiling* paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN.
3. Setiap kali wajib pajak akan melakukan transaksi pengiriman SPT, maka wajib pajak harus mengisi kode verifikasi yang akan dikirimkan oleh sistem *e-Filing* melalui e-mail milik wajib pajak. Yang berfungsi sebagai ID dan untuk keamanan (enkripsi data) setiap kali melakukan pengiriman *eFiling* ke pihak Direktorat Jenderal Pajak.
4. SPT yang telah diisi lengkap oleh wajib pajak dapat dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan sebagai tanda terima atas SPT tersebut,

Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan bukti penerimaan secara elektronik.

5. Bukti penerimaan elektronik ini berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal dan jam terima, Nomor Transaksi Penerimaan Surat Pemberitahuan (NTPS), Nomor Transaksi Penerimaan ASP (NTPA) dan nama perusahaan ASP.
6. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian surat pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
7. Wajib pajak mencetak, menandatangani dan menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada) dan dokumen lainnya yang wajib di lampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling lambat:
 - a. 14 hari sejak batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian.
 - b. 14 hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (eSPT) dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.
8. Apabila kewajiban menyampaikan induk Surat Pemberitahuan (SPT) beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada), maksudnya wajib pajak bisa membawa surat Pemberitahuan (SPT) tanpa membawa Surat Setoran Pajak (SSP), karena yang paling diwajibkan hanya membawa induk Surat

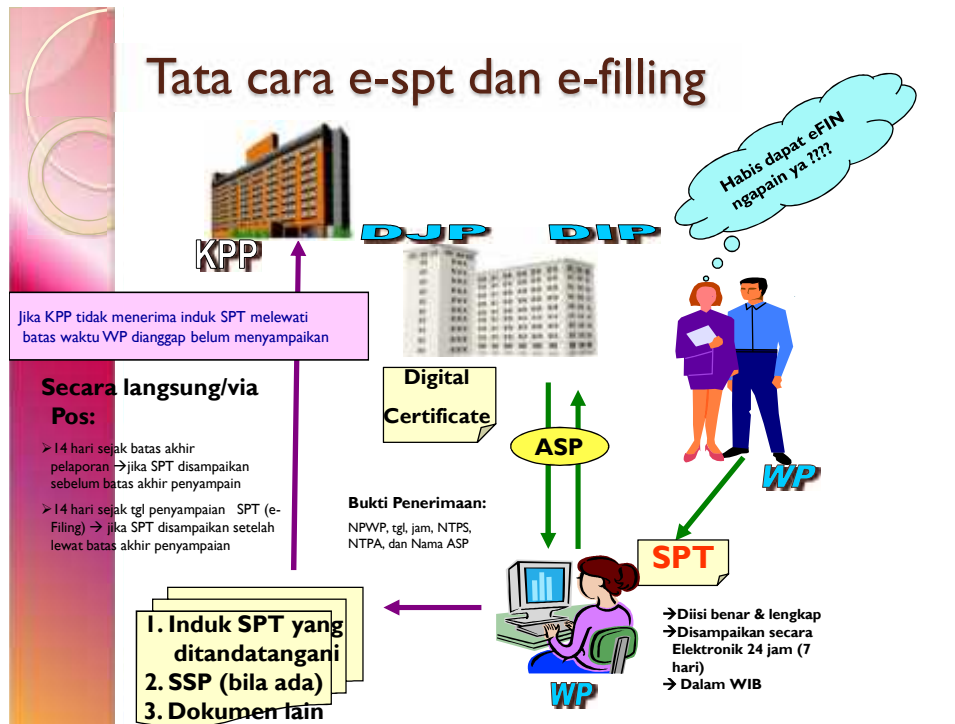
Pemberitahuan (SPT), dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan disampaikan melalui pos secara tercatat, maka tanggal penerimaan induk Surat Pemberitahuan beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.

9. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
10. Application Service Provider (ASP) memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa Surat Pemberitahuan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, Prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (*e-SPT*) adalah : SPT dalam bentuk elektronik (*e-SPT*) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (*CD, disket, flash disk* dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

Aplikasi Surat Pemberitahuan Electronic (*e-SPT*) merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi Surat Pemberitahuan electronic (*e-SPT*) Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-*generate* data Elektronik SPT serta mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya.

GAMBAR III.2
TATA CARA E-SPT DAN E-FILLING



Prosedur Penyampaian *e*-SPT adalah sebagai berikut :

12. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi *e*-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
13. Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e*-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
 - a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan
 - b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
 - c. Faktur Pajak

- d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak.
14. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
 15. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut;
 16. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi *e-SPT*.
 17. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*;
 18. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media elektronik;
 19. Wajib Pajak Menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
 - a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan *file*

data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan, atau

b. melalui *e-Filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20. Atas penyampaian Surat Pemberitahuan Electronic (*e-SPT*) secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT (Tempat Pelayanan Terpadu).

21. Sedangkan penyampaian Surat Pemberitahuan Electronic (*e-SPT*) melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima Surat Pemberitahuan (SPT), atas penyampaian melalui Electronic Filing System (*e-Filing*) diberikan bukti penerimaan elektronik.

2. Sanksi Tidak atau Keterlambatan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)
2. Untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

4. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. Kendala dalam Pendaftaran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Electronic (E-SPT) dan Electronic Filling System (E-FILLING)

Kendala yang dihadapi KPP sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) :

- a. Kurangnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara *e-Filing* sehingga penggunaan *e-Filing* belum berjalan maksimal
- b. KPP sering mendapatkan keluhan dari Wajib Pajak sendiri, mereka menganggap lebih rumit apabila terjadi salah *input*, aplikasi *e-SPT* tersebut membutuhkan pengetahuan yang khusus. Disebabkan kurangnya pemahaman teknologi.
- c. Keengganan wajib pajak untuk memakai aplikasi karena terbiasa melapor secara manual.
- d. Komputer yang digunakan biasanya secara tiba-tiba terjadi *trouble* atau tidak dapat dijalankan.
- e. Berbagai versi *e-SPT* yang bermasalah dengan kompatibilitas, sehingga menyulitkan wajib pajak atau terjadinya *system error* pada saat loading *e-SPT* kedalam komputer sehingga laporan Wajib Pajak bisa tertunda diterima.
- f. Terjadinya kejadian di saat menghimbau ke wajib pajak, dimana terjadinya perselisihan antara petugas pajak dan wajib pajak yang bandel dalam

menyampaikan SPT dengan menggunakan eFilling, sehingga melibatkan polisi.

- g. Karena adanya pemahaman petugas yang tidak merata.

Langkah yang telah dilakukan KPP untuk meningkatkan jumlah kepatuhan Surat Pemberitahuan Electronic (e-SPT) dan Electronic Filling System (e-Filling) adalah:

- a. Asistensi dan sosialisasi kepada wajib pajak secara lebih intens.

Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang telah diwajibkan menggunakan eSPT, dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai system elektronik ini.

- b. Himbauan

Dimana KPP menghimbau kepada wajib pajak dengan memberikan surat himbauan kepada wajib pajak orang pribadi mau pun badan yang telah melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan KPP Pratama Senapelan yaitu setelah melaporkan SPT sebanyak 25 Surat Pemberitahuan (SPT)

- c. Pemantauan atau pengawasan pelaporan wajib pajak

Di KPP Pratama Senapelan ini, dimana adanya pegawai yang ditunjuk untuk memeriksa wajib pajak yang seharusnya menggunakan system elektronik dengan ketentuan wajib pajak yang telah melaporkan SPT sebanyak 25 SPT.

d. In House Training (IHT) kepada petugas

Yaitu melakukan pelatihan kepada petugas, seperti adanya pelatihan khusus pajak yang akan diselenggarakan di KPP Pratama Senapelan. Dan tindakan KPP apabila ada wajib pajak yang melaporkan SPT nya tidak lengkap akan dilakukan penelitian oleh *Account Representative* (AR).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekap wawancara, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaporan eSPT dan eFilling wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan belum cukup banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang menyampaikan secara manual. Karena wajib pajak banyak yang belum memahami dengan system elektronik.
- b. Perbandingan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang melapor dan menyampaikan eSPT tahun 2012 sebanyak 301 wajib pajak dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT secara manual pada tahun 2010 sebanyak 30.053 wajib pajak.
- c. E-SPT dan E-FILLING memiliki beberapa kelebihan, antaranya cepat, aman, data perpajakan terorganisir dengan baik, penghitungan dilakukan secara cepat dan menghindari pemborosan kertas.
- d. E-SPT dan E-FILLING memiliki beberapa manfaat, diantaranya mengurangi resiko kesalahan input perekaman, tidak perlu melakukan perekaman SPT yang dilaporkan Wajib Pajak dan mengurangi kertas dokumen perpajakan
- e. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan juga memiliki beberapa kendala sehubungan dengan eSPT dan eFilling, antaranya wajib pajak yang tidak

mengerti, keengganan wajib pajak, terjadinya system error pada komputer dan pemahaman petugas tidak merata.

- f. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan juga memiliki upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan system elektronik, antaranya sosialisasi, himbauan, pemantauan dan pelatihan.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran dan pelaporan e-SPT dan e-Filling oleh wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan masalah, selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menggunakan eSPT dan eFilling. Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis sampaikan :

- a. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya lebih meningkatkan upaya-upaya penyuluhan melalui pelatihan mau pun seminar secara intensif dalam rangka melakukan bimbingan penggunaan eSPT dan eFilling, sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi eSPT dan eFilling dengan baik dan benar.
- b. KPP Pratama Senapelan terus melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi maupun memberikan penjelasan langsung ke Wajib Pajak, pada saat Wajib Pajak datang ke KPP.
- c. Melakukan kerja sama dengan Kantor Kelurahan dan beberapa Perguruan Tinggi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat tentang teknis dan

mekanisme penggunaan eSPT dan e-Filling, agar masyarakat lebih memahami dengan penggunaan system aplikasi e-SPT dan e-Filling. Dalam hal ini pihak Kantor Kelurahan menjadi pihak mediator yang menjembatani terjadinya proses sosialisasi e-SPT dan e-Filling yang diberikan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada masyarakat di Kelurahan setempat. Demikian juga dengan adanya kerjasama antara KPP Pratama Senapelan dan Perguruan Tinggi, diberapa warga Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, setelah diberikan sosialisasi tentang e-SPT dan e_filling oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada mereka, selanjutnya warga Perguruan Tinggi yang telah mempunyai wacana tentang e-SPT dan e-Filling itu diarahkan agar dapat melakukan sosialisasi ulang terhadap lingkungan terdekat mereka.

- d. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam penyuluhan, seperti KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan).
- e. Pelatihan bagi pegawai di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tentang aplikasi eSPT dan eFilling, khususnya untuk memperdalam kemampuan dalam menangani masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga dapat menangani sendiri masalah yang timbul pada sistem saat itu juga.
- f. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan terus berupaya untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Anastasia Diana, *Perpajakan Indonesia Edisi 3*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010
- Fitriandi, *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2011
- Fidel, *Cara Mudah dan Praktis memahami Masalah-masalah Perpajakan*, Penerbit Murai Kencana 2010
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2008
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2009
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2011
- Mujono, *Ketentuan Umum Perpajakan Edisi Revisi 2007*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2007
- Muljono, Djoko. *Panduan Brevet Pajak Akuntansi- Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, Penerbit Andi, Jakarta 2010
- Nurmantu , *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, Penerbit Granit, Jakarta 2003
- Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Penerbit Andi, Jakarta 2009
- Pudyatmoko Sri, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2009
- Pudyatmoko Sri, *Hukum Pajak Edisi Revisi 2010*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010
- Resmi Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Revisi 2007*, Penerbit Ariyanto, Yogyakarta 2007.
- Resmi Siti. *Perpajakan Edisi 6*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010
- Suhartono, *Ketentuan Umum Perpajakan Edisi Revisi 2010*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2010

Sri Perpajakan Indonesia-9, *SPT elektronik PPh Pekerja Ditanggung Pemerintah dan Bebas Fiskal*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2006

Yulianto, *Perapajakan Aplikasi dan Terapannya*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2010

Non Buku

[www. Pajakonline.com](http://www.Pajakonline.com), Tata Cara Perpajakan, 04 Februari 2013

[www. Unsurat.ac.id](http://www.Unsurat.ac.id), eSPT dan eFilling, 04 Februari 2013

[www. Peraturanpajak.com](http://www.Peraturanpajak.com), Tata Cara Pendaftaran Espt dan eFilling

[www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id), Tata Cara Pendaftaran eSPT dan eFilling

[www. Laporpajak.com](http://www.Laporpajak.com), Kendala eSPT dan eFilling

Peraturan undang – undang

Undang-Undang No.28 Tahun 2007Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Perubahan dan Peraturan Terkini.